

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Buffer zone merujuk pada suatu wilayah tertentu sebagai area pemisahan antara kekuatan yang berselisih atau berperang dan mengurangi risiko munculnya konflik yang baru.¹ Secara spesifik, *buffer zone* diartikan sebagai:

*A geographical space that has one or more independent political units, but neutral, that is lying between two or more competing powers or their sphere of influence or between rival or greater power block and separates these two and reduces the conflict in a way that they have agreed on its buffer situation..*²

Berdasarkan pengertian tersebut, *buffer zone* cenderung independen dan netral dari pengaruh pihak-pihak yang berkonflik. Zona ini memisahkan serta mengurangi potensi konflik yang akan terjadi berdasarkan kesepakatan yang sudah dicapai. Maka setiap *buffer zone* memiliki karakteristik tersendiri dengan berdasarkan pengetahuan, batasan geopolitik, fungsi, dan rekognisi dominasi di dalam regional.³

Terdapat berbagai kasus penerapan *buffer zone* dalam konflik-konflik yang pernah terjadi. Kasus-kasus tersebut meliputi konflik pada *Cyprus-Northern Cyprus*, Irak-Kuwait, Israel-Gaza, Korea Utara-Korea Selatan, dan Mesir-Gaza.⁴ Namun, salah satu kasus yang banyak diberitakan akhir-akhir ini adalah *buffer zone* yang berlangsung di perbatasan Suriah.

¹ United States/Department of Defense, Dictionary of Military Terms and Acronyms (Washington, D.C.: GPO, 2011).

² Mohammad Reza Hafeznia, "Explanation of the Structural and Functional Characteristics of Geographical Buffer Spaces," *Geopolitics Quarterly*, (2012): 6-7.

³ Mohammad Reza Hafeznia, 8.

⁴ Eian Katz, "Between Here and There: Buffer Zones in International Law," *The University of Chicago Law Review*, (2017): 1391

Merebaknya konflik Suriah yang telah berlangsung lama memunculkan inisiasi untuk didirikannya *buffer zone* di perbatasan utara Suriah. Hal ini diusulkan oleh pemerintah Turki yang berlandaskan pada NATO's *Article IV*⁵ yaitu penjelasan mengenai adanya usaha untuk berunding ketika suatu negara merasa terancam.⁶ Hal yang diutarakan oleh pemerintah Turki adalah inisiasi pendirian *buffer zone* di perbatasan utara Suriah.⁷ Pemerintah Turki menyatakan bahwa kelompok Kurdi PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê), PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat), dan YPG (Yekîneyên Parastina Gel) sebagai kelompok teroris berbahaya yang mengancam keamanan nasional Turki.⁸ Pemerintah Turki juga khawatir jika kelompok tersebut akan membangkitkan identitas nasional, budaya dan politik bangsa Kurdi ke dalam teritorial mereka.⁹ Hal ini dikarenakan adanya komunitas Kurdi yang mendiami sebagian wilayah Turki.

Turki telah menyepakati penetapan *buffer zone* dengan Amerika Serikat pada Agustus 2019, di mana zona ini berada di perbatasan Suriah yang dikuasai kelompok Kurdi.¹⁰ Keberadaan *buffer zone* tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan antara pasukan militer Turki dengan Kurdi. Hasil dari kesepakatan ini adalah disetujuinya keberadaan *buffer zone* yang hanya boleh diduduki oleh pasukan SDF

⁵ "The North Atlantic Treaty," North Atlantic Treaty Organization, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm, diakses pada 20 Februari 2021.

⁶ Robert Coalson, "What Are NATO's Articles 4 And 5?," <https://www.rferl.org/a/explainer-nato-articles-4-and-5/24626653.html>, diakses pada 20 Januari 2021.

⁷ Lioner dan Gustav. "The futility of buffer zones in international politics." *Orbis*, (2016).

⁸ Krisztian dan Peter, "Syrian Kurds, Rojava and Alternative Society Building in Middle East", *Hungarian Defense Review*, (2020): 32.

⁹ Ghazala Jango, "Understanding the Conflict between PKK and Turkey", <https://newscoop.com/understanding-the-conflict-between-the-pkk-and-turkey/>, diakses pada 11 Mei 2021.

¹⁰ Agence France-Presse, "Coalition says 'Good Progress' in North Syria Buffer Zone", <https://www.voanews.com/usa/coalition-says-good-progress-north-syria-buffer-zone>, diakses pada 20 Januari 2021.

(Syrian Democratic Forces), selaku pihak yang diberi wewenang dari hasil kesepakatan Turki-AS.¹¹ Kesepakatan *buffer zone* ini memiliki kedalaman 5 kilometer serta memiliki bentangan 115 kilometer di sepanjang perbatasan Suriah.¹² Dalam kesepakatan ini, AS juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara Kurdi dengan Turki dengan memberikan wewenang kepada SDF. Namun, Turki merasa tidak puas terhadap keberadaan SDF di area tersebut.¹³ Hal ini dikarenakan SDF adalah sekutu dari PKK serta merupakan pasukan militer wilayah otonomi khusus Suriah Utara, domisili dari kelompok-kelompok Kurdi. Kesepakatan ini berakhir saat AS menarik pasukan militernya dari Suriah dan tidak ingin untuk ikut campur dalam permasalahan Suriah pada Oktober 2019.¹⁴

Penarikan pasukan AS dari Suriah dan keinginan AS untuk tidak campur tangan dalam urusan Kurdi memberi sinyal bagi Turki untuk melanggar kesepakatan tersebut dengan melancarkan operasi militer terhadap kelompok Kurdi di Suriah. Pemerintah Turki merasa tidak puas atas *buffer zone* yang telah disepakati sebelumnya. Terhitung pada 9 Oktober 2019, sebanyak sepuluh ribu¹⁵ pasukan SDF telah bertempur melawan lima belas ribu tentara Turki beserta empat belas ribu pasukan SNA (Syrian

¹¹ Al-Jazeera, "Syrian Kurdish fighters 'start pulling back' from Turkish border", <https://www.aljazeera.com/news/2019/8/27/syrian-kurdish-fighters-start-pulling-back-from-turkish-border>, diakses pada 10 Mei 2021.

¹² Hisham Arafat, "SDF command reveals details about buffer zone in northeast Syria", <https://www.kurdistan24.net/en/news/1b44b8a4-ff0c-44e0-98fe-51c4682e5e6f>, diakses pada 10 Mei 2021

¹³ Khatib D.K. dan A.S. Al-Barasneh, "US-Turkish Relations in the Light of the Syrian Crisis (2011-2019)", *Perspectives on Development in the Middle East and North Africa (MENA) Region*, (2021): 25.

¹⁴ Lefteris Pitarakis dan Bassem Mroue, "Turkey begins assault on Kurdish fighters in Syria, after US forces step aside", <https://www.timesofisrael.com/turkey-launches-assault-on-kurdish-fighters-in-syria-after-us-forces-step-aside/>, diakses pada 2 Februari 2021.

¹⁵ Gregory Waters, "Return to the northeast: Syrian Army deployments against Turkish forces", <https://mei.edu/publications/return-northeast-syrian-army-deployments-against-turkish-forces>, diakses pada 22 Maret 2021.

National Army) yang disokong oleh Turki.¹⁶ Setidaknya seribu laskar pasukan SDF tewas akibat dari serangan tersebut,¹⁷ dibandingkan dengan pihak militer Turki yang hanya menelan belasan korban jiwa.¹⁸

Setelah penyerangan tersebut, pemerintah Turki tetap melanjutkan kebijakannya dalam mendirikan *buffer zone* di perbatasan Suriah dengan area yang lebih luas. Rusia menyepakati usulan Turki untuk melanjutkan agenda *buffer zone* pada 22 Oktober 2019.¹⁹ Berdasarkan kesepakatan *Sochi Agreement*,²⁰ dijelaskan bahwa zona tersebut membentang 460 kilometer di sepanjang perbatasan Turki-Suriah serta memiliki kedalaman 32 kilometer di teritorial Suriah.²¹ Hasil kesepakatan ini adalah pengusiran semua elemen kelompok Kurdi termasuk SDF dari area *buffer zone* yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan *Sochi*.²²

Keberlangsungan *buffer zone* ini dapat memperparah kondisi perekonomian Turki yang telah dilanda krisis. Pada 2018, Turki mempunyai utang luar negeri pada perusahaan dan investor asing dengan total 466 miliar dolar AS.²³ Kondisi tersebut

¹⁶ RBC, "The Pentagon says the US has no obligation to fight for the Kurd", <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5da346099a79477783628983?from=newsfeed>, diakses pada 22 Maret 2021.

¹⁷ Nur Günay dan Ümit Tetik, "Analysis Turkey's Strategy of Multiple Priority in its war on terror", <https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-turkey-s-strategy-of-multiple-priority-in-its-war-on-terror/1690260>, diakses pada 22 Maret 2021.

¹⁸ *Ap News*, "Turkish soldier killed by roadside bomb in northeast Syria", <https://apnews.com/article/27efe7695c1f434da1366786ad70f13a>, diakses pada 20 April 2021.

¹⁹ Bethan dan Julian, "Turkey and Russia agree on deal over buffer zone in northern Syria", <https://www.theguardian.com/world/2019/oct/22/turkey-and-russia-agree-deal-over-buffer-zone-in-northern-syria>, diakses pada 2 Februari 2021.

²⁰ Al-Jazeera, "Full text of Turkey, Russia agreement on northeast Syria", <https://www.aljazeera.com/news/2019/10/22/full-text-of-turkey-russia-agreement-on-northeast-syria>, diakses pada 2 Februari 2021.

²¹ Seçkin Köstem "Russian-Turkish cooperation in Syria: geopolitical alignment with limits", *Cambridge Review of International Affairs*. (2020): 13.

²² Umut Uras, "Turkey, Russia reach deal for YPG move out of Syria border area", <https://www.aljazeera.com/news/2019/10/23/turkey-russia-reach-deal-for-ypg-move-out-of-syria-border-area>, diakses pada 2 Februari 2021.

²³ Wang Zili, dkk, "Turkey's Lesson for Emerging Economies", <https://www.caixinglobal.com/2018-08-19/turkeys-lessons-for-emerging-economies-101316583.html>, diakses pada 22 April 2021.

mengakibatkan inflasi pada mata uang lira sekitar 70 persen.²⁴ Hal ini diperparah lagi ketika intervensi militer yang dilakukan oleh Turki di area *buffer zone*. Presiden AS, Trump memberikan sanksi ekonomi dan kenaikan tarif impor terhadap Turki.²⁵ Dalam beberapa bulan nilai mata uang lira mengalami inflasi lagi sekitar 30 persen.²⁶ Akibatnya, Turki mengalami kerugian mencapai 766 miliar dollar Amerika, terbesar di Timur Tengah.²⁷ Penetapan area *buffer zone* tersebut juga memiliki biaya yang cukup besar. Untuk mendirikan serta memelihara *buffer zone*, Turki membutuhkan biaya 26 miliar dolar AS.²⁸

Oleh karena itu, kebijakan untuk mendirikan *buffer zone* yang dilakukan oleh Turki di perbatasan Suriah menjadi sebuah pertanyaan dalam dinamika konflik antara Turki dengan kelompok Kurdi di Suriah. Hal ini terlihat dalam ketidakpuasan pemerintah Turki dalam kesepakatan *buffer zone* sebelumnya serta keinginan Turki untuk memperluas area tersebut walaupun berada dalam masa krisis ekonomi yang diderita oleh Turki. Peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan Turki dalam mendirikan *buffer zone* di perbatasan utara Suriah serta mengetahui hal apa yang mendasari perilaku Turki tersebut.

²⁴ Fajar Pebrianto, “Begini Awal Mula Terjadinya Krisis Keuangan Turki”, <https://bisnis.tempo.co/read/1116315/begini-awal-mula-terjadinya-krisis-keuangan-turki/full&view=ok>, diakses pada 22 April 2021.

²⁵ Aland R dan David E. S., “White House Threatens Turkey With Crippling Sanctions”, <https://www.nytimes.com/2019/10/11/us/politics/turkey-sanctions-syria-kurds-trump.html>, diakses pada 23 Maret 2021.

²⁶ Arvin Heidernia, “Impact of Turkish military operations abroad on the fall of the lira”, *Genero e Interdisciplinaridade*, (2021): 563.

²⁷ Jonatahn dan Nevzat, “Turkey’s incursion in Syria may leave its own economy wounded”, <https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-sanctions-analy-idUSKBN1WP2BR>, diakses pada 28 Maret 2021.

²⁸ Hardin Lang, “Displacements and Despair: The Turkish Invasion of Northeast Syria”, <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/displacement-and-despair-turkish-invasion-northeast-syria>, diakses pada 22 April 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam dinamika konflik di Suriah, Turki merasa bahwa terdapat ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok Kurdi yang dapat memunculkan disintegrasi negara Turki. Turki merasa khawatir bahwa Kurdi yang bisa melakukan penetrasi terhadap batasan teritorial serta mengancam identitas nasional Turki. Untuk mengatasi hal tersebut, Turki menginisiasi untuk mendirikan *buffer zone* di perbatasan Suriah. Maka dari itu Turki dengan AS menyepakati *buffer zone* yang pertama dengan tujuan untuk meredakan ketegangan antara Turki maupun Kurdi. Namun pasca penarikan pasukan AS di Suriah, Turki melanggar kesepakatan tersebut dengan melakukan intervensi militer terhadap Suriah utara. Hal yang menjadi menarik adalah ketika Turki masih tetap melanjutkan inisiasi *buffer zone* dalam kondisi militer di Suriah utara yang dinilai tidak signifikan dan mulai melemah. Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan Turki dalam *Sochi Agreement* bersama Rusia mengenai penetapan area *buffer zone* yang baru. Kebijakan Turki ini bertolak belakang dengan kondisi perekonomian negara tersebut, di mana Turki mengalami krisis ekonomi dan harus mengeluarkan dana sekitar 26 miliar dolar AS untuk mewujudkan keinginan tersebut. Oleh karena itu, peneliti berfokus terhadap alasan yang menyebabkan Turki berkeinginan untuk mendirikan *buffer zone* di perbatasan utara Suriah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah, peneliti bermaksud menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa Turki mendirikan *buffer zone* di perbatasan utara Suriah pada tahun 2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Turki mendirikan *buffer zone* pada konflik Turki-Kurdi di perbatasan utara Suriah pada tahun 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, menambah referensi dalam studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai tindakan sebuah negara dalam suatu fenomena, serta meningkatkan wawasan dan kemampuan analisis bagi peneliti.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan mengenai pendirian dan inisiasi *buffer zone* dalam mengatasi permasalahan ancaman keamanan negara.

1.6 Studi Kepustakaan

Penelitian ini mencoba merangkum beberapa penelitian sebelumnya yang berkenaan tentang kebijakan Turki dalam mendirikan zona penyangga di Suriah. Rangkuman ini berguna sebagai referensi dan acuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Bentuk rangkuman ini berupa review dari sejumlah artikel jurnal penelitian yang mutakhir.

Acuan pertama yang peneliti gunakan yaitu *Turkey's Border Security Policy Against Non-State Actors (2016-2019)*.²⁹ Artikel jurnal ini membahas mengenai analisis kebijakan Turki dalam mengamankan perbatasan Turki-Suriah dari aktor-aktor non-negara. Tulisan karya Luerdi dan Amri Hakim ini menggunakan teori sekuritisasi oleh Buzan, yang menjelaskan tentang bagaimana suatu ancaman memiliki korelasi yang kuat dalam dinamika keamanan suatu Turki.

Turki menghadapi ancaman yang akan mengakibatkan pecahnya kesatuan wilayah Turki. PKK/PYD/YPG merupakan kelompok yang menguasai wilayah sebagian besar Suriah utara. Turki merasa wilayah yang dikuasai oleh kelompok tersebut bisa mengancam integritas Turki. Keberadaan etnis Kurdi yang mendiami wilayah tenggara Turki bisa menjadi target bagi kelompok tersebut untuk memperluas jaringannya. Turki khawatir wilayah tersebut akan memisahkan diri dari negaranya.

PKK/YPG/PYD aktif beroperasi Suriah utara dan telah mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah Suriah. Namun, mereka menginginkan hal yang lebih yaitu kemerdekaan dan menginginkan wilayah ber-etnis Kurdi untuk menjadi bagiannya. Termasuk ambisi kelompok tersebut untuk memperluas wilayahnya pada teritorial Turki.

Dalam kebijakan sekuritisasi dan mencegah ancaman tersebut, pemerintah Turki melancarkan operasi militer untuk mengusir PKK/PYD/YPG dari perbatasan Turki-Suriah. Dalam *Operation Euphrates Shield* pada 2016, militer Turki berhasil menduduki wilayah dari sungai Eufrat hingga kota Afrin pada tahun 2017. Pada tahun

²⁹ Luerdi dan Amri Hakim, "Turkey's Border Security Policy Against Non-State Actors (2016-2019)." *Intermestic: Journal of International Studies* 4, no. 2 (2020).

2018 dengan alasan yang sama, *Operation Olive Branch* dilancarkan untuk merespons bangkitnya kelompok tersebut yang dikarenakan adanya peningkatan bantuan dari Amerika Serikat kepada kelompok Kurdi.

Selanjutnya pada Oktober 2019, tiga hari setelah penarikan pasukan AS dari Suriah, Turki melancarkan *Operation Peace Spring*. Turki menargetkan dua kota yang bisa direncanakan dijadikan sebagai area *buffer zone*. Pada operasi kali ini merupakan bagian yang terpenting bagi Turki dalam mengamankan perbatasan Turki dan mendirikan zona tersebut.

Artikel jurnal ini berguna bagi peneliti untuk menentukan aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana langkah militer Turki dalam mendirikan *buffer zone*. Menurut peneliti, konsep sekuritisasi yang digunakan dalam tulisan ini dapat membantu peneliti dalam memahami langkah kebijakan Turki dalam mengamankan wilayah tersebut. Peneliti berasumsi bahwa Turki merupakan aktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi regionalisme di Timur Tengah. Hal ini terbukti dalam keberhasilannya dalam serangkaian operasi militer untuk mencegah pengaruh yang dapat mengancam keamanan Turki.

Studi kedua yang peneliti gunakan yaitu *Konstruksi Identitas Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri Turki Era Recep Tayyip Erdogan: Intervensi Militer Olive Branch Turki di Suriah Tahun 2018*.³⁰ Tulisan ini mencoba menjelaskan hubungan Turki dengan Kurdi dengan kerangka konstruktivisme identitas *self-other*. Cara

³⁰ Rahmatul Amalia Nur Ahsani, "Konstruksi Identitas Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri Turki Era Recep Tayyip Erdogan: Intervensi Militer Olive Branch Turki di Suriah Tahun 2018," *Universitas Airlangga*, (2019): 1-21.

tersebut membuat Turki memandang Kurdi sebagai *other* yang mengakibatkan Turki harus mengintervensi karena perbedaan serta ancaman identitas *self* yang dibangun oleh Turki. Identitas terbentuk tidak hanya relasinya dari luar negeri (*external others*), namun juga etnisitas Kurdi yang ada di dalam Turki itu sendiri (*internal others*) yang dihasilkan dari kontestasi domestik antar elit politik yang mendefinisikan aspek identitas nasional secara berbeda. Tulisan ini juga membagi dimensi-dimensi *othering* yang dilakukan Turki terhadap Kurdi Turki, yaitu *difference*, *response of other*, dan *social distance*.

Identitas eksklusif Turki sudah muncul pada periode kemalisme, yang merupakan periode ketika pada masa awal pembentukan negara Turki sebagai negara bangsa pada 1930-an. Terdapat kebijakan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat berdasarkan etnisitas yaitu asimilasi dan emigrasi minoritas. Publik dan pemerintah Turki melihat minoritas sebagai elemen yang berbahaya dan asing dan membahayakan trayektori kedaulatan teritorial Turki. Kecurigaan minoritas membentuk suatu *othering* akibat gagalnya untuk menyelaraskan diri dengan bangsa Turki. Oleh karena itu, pada tahun 2003, awal kepemimpinan partai AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*) sebagai pemegang kekuasaan Turki, mengizinkan adanya perbedaan kultur, agama, serta etnis. Kebijakan yang dicoba dilakukan oleh AKP didasarkan untuk melupakan konflik yang terjadi dengan Kurdi. Namun, kebijakan ini terhenti akibat semakin kuatnya partai pro-Kurdi PYD di perbatasan Turki-Suriah. Akibatnya, Turki mengalami dilema kebijakan yang menyebabkan resolusi ini terhenti pada tahun 2015.

Temuan dari tulisan ini adalah kegagalan resolusi yang telah dilakukan dikarenakan resistensi gerakan PKK yang masih aktif melakukan pemberontakan

selama masa resolusi tersebut. Serangan-serangan yang dilakukan oleh PKK memperkuat nasionalisme masyarakat Turki. Dalam dimensi *social distance*, ditemukan bentuk hubungan antara Turki dengan Kurdi sebagian besar berbentuk disosiasi. Hal ini ditunjukkan dalam dimasukkannya isu PKK dalam kebijakan keamanan. Turki mempertegas batasan lingkup identitas menjadi Turki dengan masyarakat Kurdi yang tidak berkeinginan melakukan pemberontakan serta antara Turki dengan PKK.

Tulisan ketiga, adalah artikel jurnal yang berjudul *Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019*.³¹ Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam mengatasi ancaman-ancaman Kurdi dengan menggunakan teori Masyarakat Internasional oleh Hedley Bull.

Temuan dalam artikel jurnal ini adalah kekhawatiran Turki yang semakin meningkat ketika adanya bantuan dari Amerika Serikat kepada PKK ketika bersama-sama memerangi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) kala itu. Dukungan ini dimulai dari peristiwa *Kobani Siege*, yaitu ketika pasukan Kurdi YPG tidak bisa mempertahankan kota Kobani dari gempuran ISIS. Pemerintah Turki melihat ancaman PKK dalam dua hal, pertama, PKK bertujuan mewujudkan negara Kurdistan yang independen. Kedua, ideologi *radical democracy* yang dibawa oleh gerakan-gerakan Kurdi berpotensi bertabrakan dengan nasionalisme dan identitas yang diagendakan oleh pemerintah Turki.

³¹ M. Hafizh Nabiyyin, "Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019," *Jurnal ICMES*, (2020): 1-28.

Partai yang berkuasa di Turki, yaitu AKP mengidentifikasi dirinya sebagai partai yang berhaluan *conservative-democratic* yang mendukung proses demokratisasi Turki sekaligus mengedepankan nilai-nilai Islam. Namun, AKP menggunakan strategi politik populisme untuk meningkatkan pamor partainya dalam masyarakat Turki. Di sisi lain PKK berprinsip bahwa bangsa tidak didefinisikan berdasarkan etnis ataupun bahasa, tetapi berdasarkan kewarganegaraan. PKK menolak bentuk negara terpusat dengan menawarkan bentuk konfederasi komunal. Hasilnya adalah inisiasi berdirinya *Autonomous Administration of North and East Syria*. Turki memandang terbentuknya pemerintahan yang independen ini sebagai sebuah ancaman.

Partai politik resmi Turki yaitu HDP (*Halkların Demokratik Partisi*) menjadi oposisi utama bagi pendekatan yang dilakukan AKP terhadap isu Kurdi. HDP merupakan partai yang lahir dari pergerakan pro-Kurdi yang memperoleh hasil suara sebesar sebelas persen pada pemilu Turki tahun 2015. HDP mengedepankan perlawanan melalui jalur konstitusional. Oleh karena itu, AKP juga melihat HDP sebagai ancaman internal bagi mereka.

Dari sisi strategi, Turki mengedepankan tanggung jawab nasionalnya di atas tanggung jawab internasional serta kemanusiaan. Pemerintah Turki kerap menggunakan *hard power* dalam upaya memberantas pemberontakan Kurdi. Sebagian dari operasi militer yang dilakukan oleh Turki dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari negara yang ber-otoritas atas wilayah tersebut. Operasi militer kerap disertai pelanggaran-pelanggaran HAM. Turki juga menekan kebebasan berekspresi serta merepresi jurnalis dan politisi yang berasal dari suku Kurdi. Pada Agustus 2019, walikota Diyarbakir yang berasal dari HDP dicopot atas tuduhan jaringan terorisme.

Tulisan keempat, yaitu *Determinants and dimensions of the shift in Turkish behavior towards northern Syria Since 2016*.³² Artikel jurnal ini membahas mengenai perilaku Turki terhadap Suriah pasca kudeta militer Turki. Sejak 2016, Turki menggunakan *hard power* sebagai langkah efektif untuk meredam konflik-konflik yang ada Timur Tengah, terutama di Suriah. Tidak hanya itu, Turki mendukung dan memberikan bantuan kepada pasukan Free Syrian Army yang merupakan cabang pasukan militer Suriah yang membelot melawan pemerintah Assad. Selain itu, Turki bekerja sama dengan kelompok teroris Al-Nusra sebagai kaki tangan militer Turki untuk mengawasi wilayah Idlib dari serangan Kurdi.

Dalam tulisan ini ditemukan bahwa Turki memiliki ambisi menjadi negara yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kawasan Timur Tengah, menyaingi AS dan Rusia. Tetapi Liga Arab mengutuk segala langkah militer yang ditempuh Turki, termasuk Arab, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Presiden Perancis, Emmanuel Macron menyerukan pertemuan DK PBB untuk mengadakan gencatan senjata selama 30 hari hanya untuk menghentikan langkah militer Turki.

Pemerintah Turki memang memiliki agenda untuk memperkuat status negaranya di kawasan Timur tengah. Presiden Erdogan memiliki angan untuk membangun koneksi terhadap negara-negara yang dahulu pernah menjadi wilayah kesultanan Ottoman. Partai AKP selaku yang berkuasa di pemerintahan Turki mendefinisikannya sebagai “neo-Ottoman”. Dalam Tulisan ini peneliti menyadari bahwa Turki memiliki capaian untuk mendominasi kawasan Timur Tengah.

³² Mona Soliman Gadelmola, "Determinants and dimensions of the shift in Turkish behavior toward northern Syria since 2016." *REPS*, (2020).

Pemerintah Turki juga secara diam-diam mendanai pasukan militer Suriah untuk membelot dari pemerintah Assad dan membantu pencapaian kepentingan Turki.

Tulisan kelima oleh Seçkin Köstem yang berjudul *Russian-Turkish cooperation in Syria: geopolitical alignment with limits*.³³ Artikel ini membahas tentang interaksi Turki-Rusia dalam kebijakan geopolitik terhadap perbatasan utara Suriah. Tulisan ini berargumen kerja sama Turki-Rusia tidak memiliki kemungkinan menjadi kemitraan yang tahan lama karena kedua negara memiliki tujuan yang berbeda terhadap perbatasan Suriah. Walaupun begitu, kerja sama ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kelancaran kebijakan luar negeri Turki. Sanksi yang diberlakukan AS kepada Turki menjadikan Rusia sebagai arah baru bagi pemerintah Turki. Baik Rusia maupun Turki akan mencapai kesepakatan dan tujuan bersama.

Dalam artikel ini ditemukan bahwa kesepakatan Turki-Rusia memberi izin bagi Turki untuk melancarkan operasi militer di kota Al-Bab dan Al-Rai pada tahun 2016. Dengan keberpihakannya dengan Rusia, Turki tidak akan menunggu persetujuan AS dan NATO untuk menegakkan *buffer zone* di Suriah Utara. Begitu juga pada Januari 2018, persetujuan dari Rusia merupakan acuan bagi Turki dalam mengusir YPG dari kota Afrin.

Hal yang menjadi signifikan bagi kedua negara terdapat dalam *Astana Peace Process*. Pertemuan ini diadakan rutin oleh Turki, Rusia, dan Iran di Astana, Kazakhstan untuk membahas penyelesaian konflik yang terjadi di Suriah. Selama pertemuan keempat *Astana talks*, ketiga negara tersebut setuju untuk mewujudkan zona

³³ Seçkin Köstem, "Russian-Turkish cooperation in Syria: geopolitical alignment with limits." *Cambridge Review of International Affairs*, (2020).

de-eskalasi di Suriah. Hasilnya pada Oktober 2017 pasukan militer Turki bersama dengan Rusia menduduki beberapa wilayah di barat daya Suriah untuk mengamankan area tersebut dari Kurdi.

Dalam artikel jurnal tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa tindakan militer yang dilakukan oleh Turki merupakan tindakan yang memiliki dasar dan disepakati oleh Rusia. Artinya kesepakatan ini memperlancar kepentingan Turki dalam membangun zona tersebut. Peneliti merasa bahwa artikel jurnal ini berguna bagi peneliti sebagai poin penting bagi Turki dalam suksesnya pendirian *buffer zone*. Hal ini dikarenakan kesepakatan antara Turki-Rusia menghasilkan eksistensi *buffer zone* kedua yang berlangsung hingga peneliti menulis penelitian ini.

Dari lima rujukan tulisan di atas, peneliti ingin memberi batasan terkait kontribusi dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada artikel jurnal pertama hanya berfokus pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Turki yang berupa serangkaian operasi militer kepada aktor-aktor non-negara. Adapun pada tulisan ini mengedepankan operasi militer sebagai suatu solusi. Tulisan kedua membahas mengenai konstruksi nilai-nilai dari pemerintah Turki yang memandang Kurdi sebagai sosok lain dari identitas nasional Turki (*othering*). Perbedaan tidak hanya datang dari sisi luar negeri (*external others*), tetapi juga dari dalam tatanan masyarakat dan pemerintah Turki (*internal others*). Tulisan ketiga membahas mengenai langkah-langkah pemerintah Turki dalam menghadapi ancaman politik dan militer Kurdi. Artikel ini mengemukakan secara spesifik mengenai perilaku AKP sebagai pemegang kekuasaan pemerintah Turki dalam menghadapi ancaman-ancaman politik dan militer Kurdi, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Tulisan keempat membahas secara general perilaku pemerintah Turki terhadap Suriah utara. Adapun tulisan ini mengemukakan ambisi serta keterlibatan Turki dalam urusan dalam negeri Suriah. Tulisan kelima membahas mengenai hubungan dan kerja sama Turki dengan Rusia dalam mengatasi permasalahan Turki di perbatasan Suriah. Dari lima rujukan tulisan tersebut, belum ada yang membahas mengenai analisa alasan Turki dalam mendirikan *buffer zone* di perbatasan Suriah sebagai solusi keamanan nasional bagi Turki itu sendiri.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Threat Perception

Terdapat berbagai pengertian yang berbeda dari para ahli Hubungan Internasional mengenai definisi persepsi. Janice Gross Stein mendefinisikan persepsi sebagai proses menangkap informasi dengan cara empiris dan mengenali serta menafsirkan apa yang diproses.³⁴ Menurut Daniel S. Papp, persepsi merupakan sebuah pedoman dari tindakan yang dipengaruhi oleh pengalaman terdahulu, dan kekhawatiran atau ketakutan akan keinginan serta pengaruh dari pihak lain.³⁵ Sedangkan menurut John E. Mroz, persepsi adalah pemahaman dan kesadaran diri terhadap suatu peristiwa, situasi, atau proses.³⁶

Untuk teori persepsi ancaman yang peneliti gunakan, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh May Darwich. Dalam buku *Threats and Alliances in the Middle East: Saudi and Syrian Policies in a Turbulent Region*, May Darwich

³⁴ Janice Gross Stein, "Threat Perception in International Relations", *The Oxford Handbook of Political Psychology*, (2013): 1.

³⁵ Daniel S.Papp, *Contemporary International Relations Frameworks for Understanding*, (New York : Macmillan Publishing Company, 1988): 155.

³⁶ John E. Mroz, *Beyond Security: Private Perceptions Among Arabs and Israelis* (New York: 1980).

menjelaskan persepsi ancaman sebagai suatu kondisi di mana keadaan lingkungan regional yang tidak diinginkan oleh suatu negara akan mengancam kestabilan domestik serta menjadi awal mula kebijakan luar negeri demi mempertahankan keberlangsungan narasi identitas rezim pemerintahan negara tersebut.³⁷ Darwich menyatakan bahwa persepsi ancaman dalam level negara dibentuk berdasarkan faktor *material forces* dan *ideational forces*.³⁸

1. *Material Forces*

Material forces atau kekuatan material tidak hanya terkait erat dengan keamanan fisik, tetapi juga mencakup kekuatan ekonomi yang juga terkait erat dengan kemampuan militer. Kekuatan material merupakan kemampuan dan segala sumber daya yang bisa mempengaruhi negara, terutama kekuatan material. Darwich berfokus pada '*relative power distribution*' sebagai penentu utama yang mempengaruhi persepsi ancaman. Istilah ini mengacu pada distribusi dari kapabilitas dari negara apakah ia akan bisa beradaptasi atau gagal dalam mempertahankan keutuhan negaranya. Dari distribusi kekuatan tersebut, dapat diperhitungkan kemampuan suatu negara untuk menjalankan intervensi militernya dengan tujuan menyerang, mencegah (*deter*), atau bertahan. Sesuatu dianggap sebagai ancaman material jika lawan memiliki kekuatan militer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memroyeksikannya.³⁹

³⁷ May Darwich, *Threats and Alliances in the Middle East: Saudi and Syrian Policies in a Turbulent Region*, (2019): 8.

³⁸ May Darwich, "Why and When States Perceive Threats," *Threats and Alliances in the Middle East* (2019): 30.

³⁹ May Darwich, "Ideational and Material Forces in Threat Perception: The Divergent Cases of Syria and Saudi Arabia During the Iran-Iraq War (1980-1988), *Journal of Global Security Studies*, (2016): 145

2. *Ideational Forces*

Faktor ideasional meliputi elemen budaya, norma, nilai-nilai, keyakinan, identitas, dan ideologi. Jika *material force* merujuk pada distribusi kekuatan, maka ideational menekankan pada distribusi ide dan pengetahuan.⁴⁰ Ancaman pada faktor ideasional muncul ketika narasi nilai-nilai diproyeksikan dan dimiliki oleh pihak lain mengancam narasi identitas pemegang kekuasaan dalam tingkat eksternal maupun dalam domestik. Di antara berbagai elemen ideasional, Darwich berfokus pada elemen identitas sebagai bagian dari ranah keamanan ontologis (*ontological security*) yang akan lebih menjelaskan persepsi ancaman dalam identitas suatu negara.⁴¹ Identitas suatu negara adalah hasil dari dua cara, yaitu interaksi kontemporer suatu negara dan karakteristik yang membentuk persepsi negara.

Dalam menjelaskan secara sistematis mengapa dan kapan *ideational forces* bisa menciptakan dasar bagi pemegang kekuasaan mengenai persepsi ancaman mereka, Darwich mendefinisikannya ke dalam distribusi kekuasaan regional (*regional power distribution*) dan fluiditas identitas suatu rezim (*fluidity of the regime identity*). Suatu negara bisa saja memiliki banyak identitas, hal ini menjadikan identitas negara berubah-ubah (*fluid*) dan menjadikan suatu kendala tersendiri bagi elit politik negara. Di sisi lain, identitas negara dapat bersifat kaku dan tetap, yang mana dapat melihat ancaman ideasional sebagai hal penting bagi mereka dikarenakan pengecualian mereka terhadap identitas-identitas lain di dalam negara tersebut. Oleh karena itu, terdapat

⁴⁰ Wendt, Alexander, *Social Theory of International Politics*, (Cambridge: University Press, 1999): 24.

⁴¹ May Darwich, 34.

empat jenis kondisi negara dalam menghadapi fluiditas dan cara penampuk kekuasaan mengeluarkan kebijakannya.

Tabel 1.1 *The Conditions of The Interplay Between Ideational and Material Forces*

Material Forces	Ideational Forces	
	Fixed/Rigid-Identity	Fluid/Multi-Identity
Single Policy Option	(1) Negara memiliki identitas tetap dan terbatas dan hanya mempunyai satu pilihan kebijakan.	(4) Pemerintah memiliki banyak identitas tetapi mempunyai opsi kebijakan terbatas. (<i>Ancaman dari material forces</i> mengesampingkan batasan identitas).
Multiple Policy Options	(3) Pemerintah mempunyai identitas tetap/ memiliki beberapa pilihan kebijakan dalam mengarahkan <i>relative power distribution</i> . Ancaman identitas mengesampingkan <i>power distribution</i> .	(2) Pemerintah mempunyai banyak identitas dan memiliki berbagai pilihan kebijakan untuk menghadapi ancaman identitas maupun fisik.

Sumber: May Darwich, (2019).⁴²

Pada kondisi pertama ketika negara hanya memiliki identitas yang terbatas, sementara hasil keluaran kebijakan terlihat jelas untuk memastikan keamanan fisik sebuah negara. Situasi ini terjadi pada kasus di mana para aktor mengalami ketakutan

⁴² May Darwich, 43.

akan kerugian dan ancaman. Pada kondisi kedua, di mana distribusi kekuasaan memberikan berbagai pilihan kebijakan dalam mengejar keamanan fisik negara. Disamping itu, negara memiliki multi-identitas yang membuat pembuat kebijakan merasa sulit untuk memprioritaskan identitas mana yang sesuai dengan opsi kebijakan tertentu. Contoh dari kasus ini adalah ketika perubahan aliansi Mesir pada tahun 1973. Mesir yang memiliki identitas yang banyak memungkinkan para pembuat kebijakan untuk bebas untuk bersekutu dengan Amerika Serikat atau Uni Soviet mengenai urusannya dengan Israel.

Kondisi ketiga adalah ketika situasi di mana identitas negara yang bersifat kaku dan memiliki berbagai pilihan kebijakan. Dalam situasi ini, pemerintah menganggap ancaman identitas sebagai hal yang utama. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan akan berusaha memperkuat keamanan ontologis mereka. Contoh kasusnya adalah ketika Ikhwanul Muslimin ingin mengambil alih pemerintahan Mesir yang memberikan ketidakstabilan identitas Arab Saudi sebagai pemimpin Sunni. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 2011 membuat Mesir lemah secara ekonomi, namun membangkitkan pengaruh gerakan komunitas masyarakat yang merupakan ancaman bagi identitas Arab Saudi. Pada kondisi keempat, ketika pemerintah memiliki identitas yang *fluid* tetapi hanya memiliki satu opsi kebijakan untuk memastikan keamanan fisik suatu negara. Dalam situasi seperti ini, pemerintah secara konsisten dihadapkan pada pilihan kebijakan yang terbatas dalam menghadapi ancaman yang bersifat fisik. Contoh kasus ini adalah ketika rezim pemerintah Suriah memiliki sedikit pilihan kebijakan mengenai prioritas utama identitas mereka dalam menstabilkan

urusan politik mereka. Pemerintah Suriah memiliki bermacam-macam identitas seperti Arab, *Baathist*, *Levantine*, Mediterania, dan etnis lainnya.

Dalam kasus Turki, identitas pemerintahan Turki dipegang oleh partai AKP yang menginginkan Turki sebagai negara Muslim yang utuh. Turki sendiri memang merupakan negara demokrasi dan sekuler, tetapi pemerintah ingin membangun narasi untuk mengembalikan kejayaan masa lalunya melalui gerakan “neo-Ottoman” salah satunya dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam aspek pemerintahan. Turki sendiri memiliki kontradiksi identitas antara sekuler dan Islam. Hal ini dikarenakan sejak awal pembentukan negara Republik Turki sudah dibentuk sistem sekulerisme yang mengadopsi sistem pemerintahan negara-negara di Eropa.⁴³ Oleh karena itu, identitas yang ada di masyarakat Turki setidaknya memiliki dua pilihan, apakah harus tetap aman berada di bawah sistem sekuler atau meraih ambisi mengembalikan kejayaan nilai-nilai Utsmaniah.

Ancaman-ancaman Kurdi dapat mengancam narasi-narasi identitas yang ada atau sedang dibangun oleh pemerintah Turki. Ancaman Kurdi yang mewadahi segala usaha pencapaian nasionalisasi Kurdi dengan ideologi sosialis yang dibawa oleh kelompok tersebut. Keberhasilan pembentukan wilayah otonom yang dikelola oleh Kurdi membawa ancaman yang tidak hanya kepada risiko keamanan, namun pada ancaman eksistensial identitas negara Turki. Keberadaan ancaman Kurdi bisa merusak identitas “neo-ottoman” yang dibangun oleh Turki. Pemerintah tidak ingin melihat

⁴³ Agus Haryanto Dkk, “Pengaruh Partai AKP terhadap Identitas Negara Turki pada Masa Kepemimpinan Erdogan”, *Global Strategis* (2019): 100.

segala bentuk pemerintahan dan menggunakan istilah ‘teroris’ sebagai kedok untuk mengeliminasi ancaman tersebut.

1.7.2 Keamanan Ontologis (Ontological Security)

Keamanan ontologis merupakan bentuk dari persepsi ancaman pada bidang identitas yang mencoba menaruh tingkat analisisnya dari individu menjadi tingkat negara. Keamanan ontologis menawarkan penjelasan pada perilaku kebijakan luar negeri yang didorong oleh ancaman yang bersifat ideasional.⁴⁴ Negara tidak hanya mencari keamanan fisik tetapi juga keamanan ontologis, yaitu keamanan identitas diri dari suatu negara. Keamanan yang ingin dicapai bukanlah terhadap apa yang tampak dan dirasakan, namun perasaan subjektif mengenai identitas dan siapa dirinya, yang memotivasi tindakan dan pilihan sebuah aktor. Dalam teori ini, negara akan berusaha berperilaku mengikuti moral karena hal tersebut membantu mereka mempertahankan identitas diri mereka dan dapat memenuhi keamanan ontologis mereka.⁴⁵ Dengan kata lain, negara perlu merasa aman terhadap identitas mereka, seperti negara tersebut jika dipandang oleh pihak lainnya.

Ketika suatu negara merasa identitas nasionalnya terganggu, maka kondisi ini dapat memicu ketidakamanan ontologis (*ontological insecurity*). Darwich menjelaskan bahwa faktor endogen dan eksogen suatu aktor dapat menyebabkan ketidakamanan ontologis. Faktor endogen disebabkan oleh kontradiksi yang muncul dalam narasi identitas mereka, atau ketika mereka bertindak tidak sesuai dengan identitas mereka. Pada faktor eksogen, suatu aktor akan merasa *insecure* jika keunikan dari identitas

⁴⁴ May Darwich, 34.

⁴⁵ Steele, 2008, 2.

mereka diganggu oleh pihak lain. Identitas mereka akan terancam jika suatu aktor semakin identik satu sama lainnya. Mereka merasa identitas diri mereka akan hilang jika ada pihak lain yang menyerupai diri mereka.

Dalam membangun identitas, pandangan terhadap sisi identitas tidak bisa lepas dari hubungan satu sama lainnya (self-other) dan selalu memiliki reaksi dengan hubungan yang baru.⁴⁶ Oleh karena itu, sumber keamanan ontologis terdapat pada faktor eksogen dan endogen yang saling berkaitan. Perilaku aktor memperoleh makna identitas tidak hanya melalui karakteristik aktor yang didapati dari pemahaman reflektif aktor itu sendiri, tetapi juga melalui keunikan narasi dari aktor lainnya. Dengan dua dimensi ini, konsep identitas dan ranah keamanan ontologis berfungsi sebagai penentu antara sisi eksternal dan domestik suatu negara.

Untuk mengetahui keadaan dan kondisi dengan cara apa negara bisa terancam, peneliti merasa memerlukan suatu indikator agar lebih bisa menjelaskan dan menerapkan konsep ini pada bab selanjutnya. Maka dari itu, terdapat beberapa mekanisme di mana aktor merasa tidak aman secara ontologis. Peneliti menemukan bahwa Anthony Giddens menjelaskan beberapa mekanisme tersebut yaitu “*questions of time, space, continuity, and identity*”.⁴⁷ Namun, penjelasan Giddens masih dalam ranah psikologi dan sosiologi. Secara lebih relevan dalam keilmuan HI, Jelena Subotić menjelaskannya ke dalam empat mekanisme yang berhubungan dengan mekanisme Giddens, yaitu *secure identities, biographical continuities, international status*, dan

⁴⁶ Dirk Nabers, “Filling the Void of Meaning: Identity Construction in U.S. Foreign Policy After”, *Foreign Policy Analysis*, (2009): 195.

⁴⁷ Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity: Self and Society in The Late Modern Age*, (Cambridge: Polity Press, 1991): 37.

alliances and friendships.⁴⁸ Mekanisme ini pertama dan kedua bersifat reflektif, sedangkan yang ketiga dan keempat lebih kepada relasional. Adapun mekanisme ini terkait dengan faktor endogen dan eksogen yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, keempat mekanisme tersebut memiliki kriteria yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, mekanisme-mekanisme tersebut yaitu: (1) *Threats to the coherence of the self-identity*; 2) *Threats to the continuity of the autobiographical narrative*; (3) *Threats of inferior status*; dan (4) *Threats to trust in the outside world*.

1.7.2.1 Incoherence of The Self-Identity

Mekanisme ini menjelaskan mengenai kecemasan tentang koherensi atau keselarasan dan integritas identitas diri dan narasinya. Kegagalan untuk memercayai integritas diri adalah salah satu tanda dari ancaman ontologis. Ancaman ini terkait dengan rasa malu, yang berdampak pada integritas identitas. Rasa malu (shame), pada dasarnya adalah kecemasan mengenai koherensi dan konsistensi narasi biografi dari aktor dan tindakan yang membenarkannya. Ancaman ini muncul ketika aktor menafsirkan tindakan atau pandangan pihak lain tentang tindakannya tidak konsisten dengan narasinya.⁴⁹ Dengan menarik hubungan antara praktik kebijakan negara dengan identitas dirinya dan pembenarannya dari tindakan tersebut, aktor lain akan dapat mengintimidasi identitas aktor. Dalam pengoperasiannya, diperlukan adanya tanda-tanda dari inkonsistensi dan inkoherensi tindakannya dengan identitas narasinya. Secara sederhana, mekanisme ini menjelaskan bahwa narasi identitas yang dibangun oleh suatu aktor bertolak belakang dengan tindakannya dikarenakan adanya faktor

⁴⁸ Jelena Subotić, "Political memory, ontological security, and Holocaust remembrance in post-communist Europe", *European Security*, (2018): 299.

⁴⁹ Brent J. Steele, *Ontological Security in International Relations*, (New York: Routledge, 2008): 65.

yang menyebabkan hal tersebut, seperti rasa malu (shame). Ketika Turki memperjuangkan identitas dirinya akan ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kasus penelitian ini.

1.7.2.2 Discontinuity of The Autobiographical Narrative

Jika mekanisme pertama berkaitan dengan ancaman terhadap koherensi narasi, mekanisme kedua berkaitan dengan ancaman dengan keberlangsungannya. Tanda dari mekanisme ini adalah kurangnya perasaan kontinuitas biografis secara konsisten. Narasi yang membentuk identitas diri harus diperbarui melalui integrasi fenomena baru dari lingkungannya. Fenomena-fenomena ini dapat membentuk serangkaian peristiwa yang dapat mengganggu kepercayaan aktor, sehingga mengakibatkan aktor merasakan kecemasan. Narasi identitas juga dapat terancam dengan narasi alternatif, yang pada umumnya berasal dari versi asing yang dibangun oleh pihak lain (the other).⁵⁰ Ancaman terhadap keberlangsungan biasanya disebabkan oleh krisis atau trauma yang tidak dapat dengan mudah tergabung ke dalam narasi. Jadi, jika mekanisme pertama menyangkut dengan kecemasan sebagai rasa malu atas tindakan dan perilaku tidak sesuai dengan narasi, maka mekanisme kedua terkait dengan kecemasan tentang kemampuan narasi itu sendiri untuk menahan ancaman yang mungkin merusaknya. Jadi, suatu negara menerima persepsi ancaman ontologis ketika dihadapkan dengan narasi alternatif yang mengganggu identitasnya. Mekanisme ini dioperasionalkan sebagai Turki dalam peran masa lalu pemerintah Turki yang berubah seiring waktu sehingga bisa mengubah narasi identitas pemerintah Turki.

⁵⁰ Brent J. Steele, 70.

1.7.2.3 Status Inferior

Mekanisme ini berkaitan dengan kecemasan eksistensial tentang harga diri (self-worth), dan nilai narasi biografis, baik bagi aktor itu sendiri maupun aktor lainnya. Pertanda dari ancaman ontologis ini secara khusus adalah kurangnya keharmonisan dalam identitas aktor dan hubungannya dengan kemampuan untuk diterima secara sosial di level internasional.⁵¹ Adapun pada mekanisme ini berkaitan dengan ancaman mengenai status inferior, negara akan melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah dirinya direndahkan atau dianggap sebagai pihak yang lemah. Jadi, suatu negara akan merasa terancam ketika ia akan menjadi inferior di mata internasional.

1.7.2.4 Stability of The Outside World

Mekanisme ini melibatkan kurangnya kepercayaan dan kepastian dalam stabilitas regional. Menurut Giddens, kepercayaan pada orang lain adalah hal yang fundamental untuk keamanan ontologis. Kepercayaan adalah “*the focal element in a generalised set of relations to the social and physical environment*”.⁵² Lingkungan (regional) juga merupakan salah satu kondisi dasar dari pertanyaan eksistensial, dan salah satu tanda dari ancaman ontologis adalah meningkatnya perhatian pada risiko di luar dirinya. Adapun mekanisme ini menganalisis bagaimana negara-negara dalam sistem internasional menggunakan stigmatisasi sebagai cara untuk mencari keamanan ontologis.⁵³ Jadi, suatu negara akan merasakan ancaman tentang lingkungan baik secara regional maupun sistem internasional.

⁵¹ Giddens, 65.

⁵² Giddens, 51.

⁵³ Rebecca Adler-Nissen, “Stigma Management in International Relations: Transgressive Identities, Norms, and Order in International Society”, *International Organization*, (2014): 144.

Dalam penelitian yang peneliti angkat, teori ini peneliti anggap mampu untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan Turki dalam mencegah ancaman Kurdi dengan pendirian *buffer zone* sebagai pencegahan ancaman tersebut. *Threat perception* yang digunakan oleh peneliti menggambarkan faktor-faktor ancaman yang mempengaruhi suatu persepsi dalam level negara, baik dari segi *material forces* maupun *ideational forces* yang dialami oleh Turki dalam menghadapi ancaman Kurdi. Selanjutnya dalam *ontological security*, bentuk-bentuk kondisi keamanan yang dibagi kedalam empat jenis keamanan dapat menjelaskan kondisi keamanan yang dialami oleh Turki.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang mencoba memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu.⁵⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif, yang mana peneliti akan menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang terdapat dalam suatu fenomena, sehingga akan diketahui alasan dari sebuah fenomena dapat terjadi.⁵⁵

1.8.2 Batasan Penelitian

Penulis memberi batasan pada dimulainya inisiasi pendirian *buffer zone* oleh Turki secara eksplisit sampai disetujuinya kesepakatan *buffer zone* kedua pada oktober 2019. Maka dari itu batasan waktu dari penelitian ini adalah selama tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun yang sama, Turki melakukan kesepakatan *buffer zone*

⁵⁴ Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003): 54.

⁵⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*". Bandung: Alfabeta. (2009).

dengan AS dan Rusia di waktu yang berbeda. Batasan akhir adalah ketika Turki dan Rusia sepakat dalam *Sochi Agreement* pada 2019 untuk mendirikan dan memelihara *buffer zone* di perbatasan utara Suriah. Penelitian ini berfokus pada aspek kerangka *ontological security* yang membahas mengenai ancaman identitas Turki

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan, dan ramalkan; dan unit eksplanasi atau variabel independen yaitu unit yang dampaknya terhadap unit analisis hendak diamati.⁵⁶ Sedangkan tingkat analisis atau level analisis digunakan untuk menemukan sasaran analisa yang tepat dan pada tingkat mana analisa harus ditekankan.⁵⁷ Maka dari itu, peneliti memerlukan penentuan unit analisis, unit eksplanasi, dan level analisis.

Unit analisis dari penelitian ini adalah kebijakan Turki mendirikan *buffer zone* di Suriah utara. Unit eksplanasi atau variabel independennya adalah ancaman kelompok Kurdi di perbatasan utara Suriah. Untuk level analisisnya berada dalam level negara, karena tindakan perilaku dan kebijakan yang dilakukan hampir semuanya berada pada negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dimulai dengan sebuah isu atau permasalahan, mengkaji dan menganalisis literatur yang berhubungan dengan isu tersebut, mengajukan pertanyaan, lalu mengumpulkan

⁵⁶ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES,1990): 39.

⁵⁷ Mochtar Mas' oed, 39-40.

data dan kemudian menganalisisnya secara keseluruhan.⁵⁸ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui situs resmi pemerintahan yaitu situs web resmi Kementerian Luar Negeri Turki. Namun, peneliti menemukan bahwa data-data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder karena adanya keterbatasan data dan akses dalam memperoleh data primer. Selain itu, Studi kepustakaan atau *library research* merupakan sumber data sekunder yang peneliti gunakan di mana data tersebut bersumber dari buku, artikel, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, berita, dan situs web mengenai kegiatan pemerintah Turki seputar tindakannya sebelum dan ketika mendirikan *buffer zone*.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara dalam menemukan dan memberikan arti terhadap serangkaian data-data ketika melakukan sebuah penelitian. Teknik analisis data bertujuan untuk membuat sebuah penjelasan secara logis dan sistematis.⁵⁹

Adapun tahapan dalam peneliti analisis data terbagi atas beberapa tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan berbagai data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu mengapa Turki mendirikan *buffer zone* dalam konflik Turki-Kurdi di Suriah.

⁵⁸ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Second Edition*, (California: Sage Publication, 2007): 38.

⁵⁹ Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Technique in Qualitative Research*, (State University of Georgia: Georgia): 97.

2. Reduksi data (*data reduction*), peneliti mereduksi atau memangkas data-data yang kurang dibutuhkan dalam penelitian sehingga data-data yang digunakan hanya data-data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian.
3. Tampilan data (*data display*): peneliti akan mengambil poin-poin penting dan menuliskan kembali menggunakan kalimat peneliti sendiri tanpa mengubah arti, ide dan makna dari data-data sebelumnya. peneliti juga akan melakukan serangkaian analisis terhadap data-data yang ada. Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada kebijakan Turki dalam mendirikan *buffer zone* di perbatasan utara Suriah. Adapun langkah yang dilakukan peneliti adalah menemukan interpretasi dan makna dari data-data dan informasi ilmiah yang sudah peneliti peroleh. Interpretasi dan pemaknaan diselaraskan dengan kerangka konseptual yang peneliti gunakan.
4. Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*), setelah penyajian data berupa hasil analisis dengan menggunakan kerangka konseptual yang peneliti pakai, peneliti akan mengambil kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan bahwa data-data yang peneliti gunakan mampu untuk menjawab penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan terhadap tulisan ilmiah atau penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai

bahan rujukan dan pembandingan, kerangka konseptual sebagai alat analisis penelitian, batasan masalah, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II : DINAMIKA PERSOALAN TURKI-KURDI

Bab ini berisikan tentang sejarah perkembangan konflik yang mengalami dinamika sehingga mengalami berbagai cara bagi Turki maupun Kurdi untuk berhadapan satu sama lain. Bab ini dimulai dengan awal mula munculnya konflik dari terbentuknya Turki modern. Selanjutnya peneliti membahas konflik yang terjadi selama Perang Dingin yang mewarnai kemunculan PKK yang terstruktur beserta perjuangan Kurdi yang lebih terorganisir. Lalu pada bagian terakhir menjelaskan permasalahan Turki-Kurdi pada masa kontemporer.

BAB III : KEBIJAKAN *BUFFER ZONE* SURIAH UTARA OLEH TURKI PADA TAHUN 2019

Bab ini berisikan tentang latar belakang dan cara Turki dalam melegitimasi kebijakannya, seperti faktor yang mendorong Turki dalam mendirikan *buffer zone* pada konflik Turki-Kurdi, yaitu narasi identitas oleh Pemerintah Turki. bagian ini juga mengurai interaksi Turki dengan aktor internasional sebagai penerapan dari narasi Turki.

BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN *BUFFER ZONE* TURKI DI SURIAH UTARA

Peneliti akan memberikan suatu analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan dan kebijakan Turki sehingga mendirikan *buffer zone*. Analisis dilakukan melalui kerangka persepsi ancaman dan *ontological security*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran terkait penelitian beserta daftar kepustakaan.



